



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
ATAS
HASIL PENYESUAIAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021 DAN
PROLEGNAS RUU PERUBAHAN TAHUN 2020-2024 YANG TELAH
DISETUIJUI DALAM RAPAT KERJA TANGGAL 14 JANUARI 2021
DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

=====

**Disampaikan oleh: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
Ketua Badan Legislasi, A. 128**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil penyusunan dan pembahasan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang UU DPD RI.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Ketentuan Pasal 105 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui Badan Legislasi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa, hasil pembahasan Prolegnas antara Badan Legislasi, Alat Kelengkapan DPD RI, serta Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi Prolegnas dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan.

Terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, Badan Legislasi DPR RI telah menerima usulan RUU sebanyak 61 (enam puluh satu) RUU yang berasal dari:

1. Komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, dan masyarakat, sebanyak 42 (empat puluh dua) RUU;
2. Pemerintah, sebanyak 13 (tiga belas) RUU; dan
3. DPD RI, sebanyak 6 (enam) RUU.

Terhadap 61 (enam puluh satu) RUU tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, sepakat untuk menggunakan parameter terhadap usulan RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yaitu:

1. RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I;
2. RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres);
3. RUU yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI;
4. RUU yang dalam tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Badan Legislasi DPR RI;
5. RUU yang dalam tahap penyusunan dan tersedia Naskah Akademik dan draft RUU; dan
6. RUU usulan baru yang telah tercantum dalam Prolegnas 2020-2024 dan memenuhi urgensi tertentu.

Pada akhirnya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI yang diselenggarakan pada tanggal 09 Maret 2021 telah memutuskan dan menyepakati hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan evaluasi Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) RUU dengan rincian, 21 (dua puluh satu) RUU diusulkan oleh DPR RI dengan catatan 2 (dua) RUU diusulkan bersama dengan Pemerintah, 10 (sepuluh) RUU diusulkan oleh Pemerintah, dan 2 (dua) RUU diusulkan oleh DPD RI.
2. RUU tentang Pemilihan Umum yang sudah disepakati dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI tanggal 14 Januari 2021 ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.
3. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan oleh Anggota DPR menjadi usulan Badan Legislasi.
4. Menetapkan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 yang semula berjumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) RUU, hal ini dikarenakan adanya:

- a. penggabungan RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dengan nomor urut 215 (usulan Pemerintah) dengan 3 (tiga) RUU yang sudah ada dalam Prolegnas Tahun 2020-2024, yaitu:
 - RUU tentang Penilai (no. urut 220/Pemerintah);
 - RUU tentang Perlelangan (no. urut 221/Pemerintah); dan
 - RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah (no. urut 222/Pemerintah);
- b. mengganti 1 (satu) RUU, yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (no. urut 194/Pemerintah) dengan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak; dan
- c. menambah 1 (satu) RUU, yaitu RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi (usulan Pemerintah).

Terhadap hasil penyesuaian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024, yang sebelumnya sudah diputuskan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14 Januari 2021, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat mini fraksi-fraksi yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, serta pendapat Pemerintah, dan PPUU DPD RI pada prinsipnya semua menyetujui hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024, dengan beberapa Fraksi memberikan persetujuan dengan catatan.

(adapun daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Bapak/Ibu Anggota.)

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil penyusunan dan pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-

2024, untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan penyusunan Prolegnas ini dalam suasana yang penuh demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat Badan Legislasi, dan Tim Ahli/Pendukung yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 23 Maret 2021
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.

A-128

LAMPIRAN I

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2021

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I	
2.	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/KOMISI III/ PEMERINTAH	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/KOMISI IV	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	DPR/KOMISI V	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR/KOMISI VI	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/KOMISI VII	

7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/KOMISI VIII	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	DPR/KOMISI IX	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.	DPR/KOMISI X	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	DPR/KOMISI XI /PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi	DPR/ BADAN LEGISLASI	

	Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.		
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ BADAN LEGISLASI	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.	DPR/ANGGOTA	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR/ANGGOTA	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.	DPR/ANGGOTA	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.	PEMERINTAH	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.	PEMERINTAH	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	PEMERINTAH	

25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).	PEMERINTAH	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara.	PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)	PEMERINTAH	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.	DPD	

33.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
-----	--	-----	--

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

LAMPIRAN II

DAFTAR

PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2020-2024

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	DPR	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan	DPR	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Paradiplomasi	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD	DPR	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Penjabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Kawasan Terpadu	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Mandiri		
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	DPR	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim	DPR	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan	DPR	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan		
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
31.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
32.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
33.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR	
34.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
35.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR	
36.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR	
37.	Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan	DPR	
38.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	
39.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR	
40.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR	
41.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR	
42.	Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
43.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Pemberantasan Kerusakan Hutan		
44.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan	DPR	
45.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR	
46.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkelapasawitan	DPR	
47.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
48.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	
49.	Rancangan Undang-Undang tentang Transportasi Daring	DPR	
50.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
51.	Rancangan Undang-Undang tentang Sanitasi	DPR	
52.	Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
53.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR	
54.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR	
55.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	
56.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR	RUU <i>Carry Over</i>
57.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR	
58.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	
59.	Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR	
60.	Rancangan Undang-Undang tentang Kendaraan Listrik	DPR	
61.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Bantuan Sosial		
62.	Rancangan Undang-Undang tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR	
63.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR	
64.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
65.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
66.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR	
67.	Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
68.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR	
69.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR	
70.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
71.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara	DPR	
72.	Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Beralkohol	DPR	
73.	Rancangan Undang-Undang tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR	
74.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	
75.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengasuhan Anak	DPR	
76.	Rancangan Undang-Undang tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR	
77.	Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	
78.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
79.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
80.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
81.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	DPR	
82.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian	DPR	
83.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPR	
84.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR	
85.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR	
86.	Rancangan Undang-Undang tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR	
87.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan Masyarakat	DPR	
88.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR	
89.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR	
90.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
91.	Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi	DPR	
92.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	
93.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR	
94.	Rancangan Undang-Undang tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan	DPR	
95.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
96.	Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR	
97.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
98.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR	
99.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
100.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya		
101.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR	
102.	Rancangan Undang-Undang tentang Persepakbolaan	DPR	
103.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR	
104.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
105.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR	
106.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR	
107.	Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
108.	Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Keuangan (<i>Financial Technology</i>)	DPR	
109.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
110.	Rancangan Undang-Undang tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR	
111.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	
112.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR	
113.	Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah	DPR	
114.	Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak	DPR	
115.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
116.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
117.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
118.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	DPR/PEMERINTAH/ DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Narkotika		
119.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
120.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
121.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
122.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
123.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH	
124.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH	
125.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/PEMERINTAH	
126.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional	DPR/PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Indonesia		
127.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/PEMERINTAH	
128.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH	
129.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH	
130.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara <i>(Omnibus Law)</i>	DPR/PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i>
131.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
132.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH	
133.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/PEMERINTAH	<i>RUU Carry Over</i>
134.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/PEMERINTAH	<i>RUU Carry Over</i>

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
135.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/PEMERINTAH	
136.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
137.	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/PEMERINTAH	
138.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/PEMERINTAH	
139.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/PEMERINTAH	
140.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/PEMERINTAH	
141.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/PEMERINTAH	
142.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan	DPR/PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam		
143.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH	
144.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/PEMERINTAH	
145.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/PEMERINTAH	
146.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH	
147.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/PEMERINTAH	
148.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/PEMERINTAH	
149.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	DPR/PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
150.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/PEMERINTAH	
151.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
152.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/PEMERINTAH	
153.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH	
154.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH	
155.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	DPR/PEMERINTAH	
156.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
157.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR/DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
158.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR/DPD	
159.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/DPD	
160.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	
161.	Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali	DPR/DPD	
162.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
163.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR/DPD	
164.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
165.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	
166.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
167.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD	
168.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD	
169.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
170.	Rancangan Undang-Undang tentang Geologi	DPR/DPD	
171.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
172.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	
173.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan	DPR/DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Seksual		
174.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
175.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
176.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD	
177.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD	
178.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
179.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
180.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH	
181.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH	
182.	Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
183.	Rancangan Undang-Undang tentang Persandian	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
184.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Nasional	PEMERINTAH	
185.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	PEMERINTAH	
186.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
187.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan	PEMERINTAH	
188.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	
189.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH	
190.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
191.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH	
192.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH	
193.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
194.	Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
195.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH	
196.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
197.	Rancangan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH	
198.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	PEMERINTAH	
199.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
200.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antar-Negara	PEMERINTAH	
201.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
202.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
203.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
204.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
205.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
206.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH	
207.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH	
208.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender	PEMERINTAH	
209.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
210.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
211.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Pembayaran Utang		
212.	Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	<i>(Omnibus Law)</i>
213.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH	
214.	Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH	
215.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH	
216.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
217.	Rancangan Undang-Undang tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTAH	
218.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	
219.	Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	
220.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
221.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	1995 tentang Kepabeanan		
222.	Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	PEMERINTAH	
223.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/DPD	
224.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD	
225.	Rancangan Undang-Undang tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD	
226.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD	
227.	Rancangan Undang-Undang tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
228.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD	
229.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
230.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketrasmigrasian	DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
231.	Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD	
232.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD	
233.	Rancangan Undang-Undang tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
234.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang	DPD	
235.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD	
236.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD	
237.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD	
238.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial	DPD	
239.	Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah	DPD	
240.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009	DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	tentang Kawasan Ekonomi Khusus		
241.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
242.	Rancangan Undang-Undang tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD	
243.	Rancangan Undang-Undang tentang Pinjaman Daerah	DPD	
244.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
245.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
246.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUMULATIF TERBUKA

1.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang